

Penerapan Aplikasi SIPRAJA dalam Pelayanan Surat Menyurat di Lingkungan Pemerintahan Kantor Desa

Application of SIPRAJA Application in Correspondence Services in the Village Government Environment

Shofi Yatul Mufidah^{1*}, Wahyu Eko Pujianto², Nafia Ilhama Qurratu'aini³

^{1,2,3} Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Sidoarjo, 61272, Indonesia

Article info: Research Article

Kata kunci:

Aplikasi SIPRAJA, Pelayanan Surat Menyurat, Pemerintahan Desa

Keywords:

SIPRAJA Application, Correspondence Services, Village Government

Article history:

Received: 28-01-2026

Accepted: 24-02-2026

^{*}Koresponden email:

Shofyshofy37@gmail.com

(c) 2026 Shofi Yatul Mufidah, Wahyu Eko Pujianto, Nafia Ilhama Qurratu'aini



Creative Commons Licence

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan aplikasi SIPRAJA (Sistem Informasi Pelayanan Rakyat) dalam pelayanan surat menyurat di kantor desa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami proses implementasi, efektivitas, efisiensi, transparansi, serta kendala yang dihadapi dalam pelayanan berbasis digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPRAJA meningkatkan kualitas pelayanan administrasi desa melalui percepatan proses pengajuan, verifikasi, dan penyelesaian surat secara lebih terstruktur dan terdokumentasi dibandingkan sistem manual. Aplikasi ini juga meningkatkan efisiensi waktu dan biaya serta memperkuat transparansi karena masyarakat dapat memantau status layanan secara daring. Selain itu, sistem digital mendukung akuntabilitas aparatur desa melalui pencatatan dan pengarsipan yang lebih tertib. Namun, implementasi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan literasi digital masyarakat, kompetensi teknologi informasi aparatur yang belum merata, serta gangguan infrastruktur jaringan internet. Secara keseluruhan, penerapan SIPRAJA menjadi langkah strategis dalam mendukung transformasi pelayanan publik berbasis digital di tingkat desa guna mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien, dan transparan.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the SIPRAJA (Public Service Information System) application in correspondence services at the village office. The research employs a descriptive qualitative approach to understand the implementation process, effectiveness, efficiency, transparency, and challenges encountered in digital-based services. The findings indicate that the implementation of SIPRAJA improves the quality of village administrative services by accelerating the submission, verification, and completion of documents in a more structured and well-documented manner compared to the previous manual system. The application also enhances time and cost efficiency and strengthens transparency, as citizens can monitor the status of their service requests online. Furthermore, the digital system supports the accountability of village officials through more orderly recording and archiving processes. However, its implementation still faces challenges, including limited digital literacy among community members, uneven information technology competence among village staff, and internet infrastructure disruptions. Overall, the implementation of SIPRAJA represents a strategic step in supporting the digital transformation of public services at the village level to achieve effective, efficient, and transparent governance.

Kutipan: Mufidah, S. Y., Pujianto, W. E., & Qurratu'aini, N. I. (2026). Application of SIPRAJA Application in Correspondence Services in the Village Government Environment. *Synergy: Journal of Business, Finance and Management (SJBFM)*, 1(1), 20–26.

1. Pendahuluan

Pelayanan publik merupakan fungsi fundamental pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan umum. Pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang berkualitas, adil, transparan, dan tidak diskriminatif kepada seluruh warga negara. Pemerintah desa sebagai unit pemerintahan terdepan memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi, seperti penerbitan surat keterangan, surat pengantar, dan dokumen kependudukan lainnya ([Jamaluddin et al., 2023](#); [Wijayanti et al., 2022](#)). Kualitas pelayanan administrasi di tingkat desa sangat menentukan tingkat kepuasan serta kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Secara empiris, pelayanan surat menyurat di banyak kantor desa sebelumnya masih dilakukan secara manual melalui pencatatan dalam buku administrasi dan pengelolaan arsip fisik. Sistem manual tersebut cenderung menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain proses pelayanan yang lambat, kurang efisien, serta tingginya potensi kesalahan administratif seperti kehilangan dokumen dan ketidaksesuaian data. Selain itu, masyarakat diwajibkan hadir secara langsung ke kantor desa dengan membawa persyaratan administrasi yang lengkap, sehingga memerlukan waktu dan biaya tambahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pelayanan konvensional belum sepenuhnya mampu menjawab tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, efektif, dan akuntabel ([Laisa et al., 2025](#); [Mulyaningsih & Rahmaningtyas, 2025](#)).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong transformasi tata kelola pemerintahan melalui penerapan konsep *e-government*. Digitalisasi pelayanan publik bertujuan meningkatkan efisiensi kinerja aparatur, mempercepat proses pelayanan, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Implementasi *e-government* juga menjadi bagian dari reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) ([Kassen, 2024](#); [Mphahlele et al., 2025](#)). Transformasi digital pada level pemerintahan desa menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan administratif yang bersifat rutin namun berdampak langsung pada masyarakat ([Abdussamad, 2024](#); [Setyawan, 2024](#)).

Sebagai bentuk inovasi pelayanan publik berbasis digital, pemerintah daerah mengembangkan aplikasi SIPRAJA (Sistem Informasi Pelayanan Rakyat) yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan administrasi secara daring, termasuk pelayanan surat menyurat di tingkat desa. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat mengajukan permohonan surat kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung ke kantor desa. Implementasi SIPRAJA diharapkan mampu mengurangi antrean, mempercepat waktu pelayanan, meningkatkan ketertiban administrasi, serta memperkuat transparansi proses pelayanan ([Aprilia & Sukmana, 2023](#)).

Namun demikian, penerapan SIPRAJA tidak terlepas dari berbagai tantangan. Aparatur desa dituntut memiliki kompetensi digital dalam mengoperasikan sistem serta memahami alur pelayanan berbasis aplikasi. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi digital masyarakat, serta kendala teknis sistem menjadi faktor yang dapat memengaruhi efektivitas implementasi aplikasi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang komprehensif untuk menilai sejauh mana penerapan SIPRAJA mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan administrasi di lingkungan pemerintahan desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian mengenai penerapan aplikasi SIPRAJA dalam pelayanan surat menyurat di lingkungan pemerintahan desa menjadi relevan dan penting dilakukan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai manfaat, hambatan, serta strategi optimalisasi implementasi SIPRAJA dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menganalisis penerapan aplikasi SIPRAJA dalam pelayanan surat menyurat di lingkungan pemerintahan kantor desa. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi, mekanisme pelayanan, serta perubahan yang terjadi setelah penggunaan aplikasi SIPRAJA dalam administrasi surat menyurat. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual kondisi aktual di lapangan, termasuk

prosedur pelayanan, peran aparatur desa, respons masyarakat, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan berbasis digital. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas dan kualitas pelayanan administrasi desa setelah penerapan SIPRAJA.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi SIPRAJA memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan surat menyurat di lingkungan pemerintahan desa. Implementasi sistem digital ini mampu mempercepat proses pengajuan, verifikasi, dan penyelesaian dokumen administrasi dibandingkan dengan sistem manual sebelumnya. Proses pelayanan menjadi lebih terstruktur dan terdokumentasi secara sistematis dalam sistem, sehingga meminimalkan kesalahan administrasi dan risiko kehilangan arsip.



Gambar 1. Tempat Pelayanan Pemerintah Desa

Dari aspek efektivitas, penggunaan SIPRAJA membantu aparatur desa dalam menjalankan prosedur pelayanan sesuai standar operasional yang telah ditetapkan. Ketepatan waktu penyelesaian surat mengalami peningkatan karena setiap tahapan pelayanan tercatat dan dapat dipantau melalui sistem. Selain itu, masyarakat dapat mengajukan permohonan surat secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor desa, sehingga mengurangi antrean serta meningkatkan kemudahan akses layanan. Dari aspek efisiensi, penerapan SIPRAJA mampu menghemat waktu dan biaya, baik bagi masyarakat maupun aparatur desa. Sistem digital memungkinkan penyimpanan arsip secara terintegrasi sehingga memudahkan pencarian data dan mengurangi beban administratif. Transparansi pelayanan juga meningkat karena masyarakat dapat memantau status permohonan secara real-time.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala, antara lain keterbatasan literasi digital sebagian masyarakat, khususnya kelompok lanjut usia, serta kemampuan teknologi informasi aparatur desa yang belum merata. Selain itu, kendala infrastruktur seperti kestabilan jaringan internet dan gangguan teknis aplikasi masih menjadi hambatan dalam optimalisasi pelayanan berbasis digital.

Pembahasan

Penerapan aplikasi sipraja telah membawa perubahan nyata dalam pelayanan administrasi di lingkungan pemerintahan desa. Pembahasan ini berfokus pada tiga aspek utama, yaitu (1) efektivitas dan efisiensi pelayanan, (2) transparansi dan kualitas administrasi, dan (3) kesiapan dan kendala sumber daya manusia.

1. Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan

Penerapan aplikasi sipraja dalam pelayanan administrasi desa terbukti meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Efektivitas pelayanan terlihat dari tercapainya tujuan pelayanan, yaitu memberikan kemudahan, kecepatan, dan ketepatan dalam pelayanan surat menyurat kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan sipraja membantu aparatur desa dalam memproses permohonan surat secara lebih terarah dan sesuai prosedur, sehingga pelayanan dapat diselesaikan dengan lebih tepat waktu ([Aprilia & Sukmana, 2023](#); [Saffana & Rodiyah, 2025](#)).

Efisiensi pelayanan juga mengalami peningkatan setelah pelayanan dilakukan secara online melalui sipraja. Proses yang sebelumnya memerlukan waktu lama dan tahapan yang berulang kini dapat disederhanakan melalui sistem digital. Masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor desa untuk mengurus surat, sehingga menghemat waktu dan biaya. Dari sisi aparatur desa, sistem ini membantu mengurangi beban kerja administrasi karena data dan arsip pelayanan tersimpan secara terintegrasi dan mudah diakses ([Doverianda et al., 2025](#)).

Selain efisiensi, penerapan sipraja juga meningkatkan efektivitas pelayanan juga terlihat dari meningkatkan ketepatan waktu dalam penyelesaian pelayanan administrasi. Pada sistem manual, proses pelayanan sering terhambat oleh antrian, kelengkapan berkas, dan pencatatan yang kurang tertib. Setelah penerapan sipraja, proses pelayanan menjadi lebih terkontrol karena setiap tahapan pelayanan tercatat dalam sistem. Hal ini membantu aparatur desa dalam memantau dan menyelesaikan pelayanan sesuai waktu yang ditentukan, sehingga kepuasan masyarakat terhadap pelayanan desa mengalami peningkatan ([Saffana & Rodiyah, 2025](#)).

Dari sisi aparatur desa, efisiensi pelayanan terlihat dari berkurangnya beban kerja administratif. Penggunaan aplikasi sipraja membantu aparatur desa dalam mengelola data dan arsip pelayanan secara digital, sehingga pencarian dan pengelolaan data menjadi lebih cepat dan mudah. Arsip pelayanan tersimpan dengan rapi dalam sistem, sehingga mengurangi risiko kehilangan dokumen dan kesalahan pencatatan yang sering terjadi pada sistem manual. Kondisi ini berdampak pada peningkatan produktivitas kerja aparatur desa ([Maylita, 2025](#)).

Penerapan sipraja juga mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, yang merupakan bagian penting dari prinsip *good governance*. Setiap proses pelayanan dapat dipantau statusnya melalui sistem, baik oleh aparatur desa maupun masyarakat. Transparansi ini membantu mengurangi potensi penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi pelayanan yang dihasilkan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berdampak pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa.

2. Transparansi dan Kualitas Transparansi

Pemanfaatan aplikasi sipraja dalam pelayanan administrasi desa merupakan upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan transparansi pelayanan publik. Transparansi pelayanan dimaknai sebagai keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat terkait prosedur, persyaratan, serta proses pelayanan. Berdasarkan hasil penelitian, sipraja memungkinkan masyarakat untuk mengetahui jenis layanan administrasi yang tersedia, alur pengajuan surat, serta status permohonan secara real time. Hal ini mengurangi ketidakpastian informasi yang sebelumnya sering terjadi pada pelayanan manual ([Oribel & Wibawani, 2023](#); [Saputra & Widiyarta, 2021](#)).

Peningkatan transparansi melalui sipraja juga berdampak langsung pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Ketika informasi pelayanan disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, maka potensi kesalahan pemahaman dan keluhan pelayanan dapat diminimalkan. Berdasarkan pengamatan selama penelitian, masyarakat merasa lebih yakin terhadap proses pelayanan karena dapat memantau sendiri tahapan pengurusan surat tanpa harus bertanya secara langsung kepada aparatur desa ([Musaddad et al., 2020](#)).

Selain itu, transparansi pelayanan yang dihasilkan melalui sipraja turut memperkuat akuntabilitas aparatur desa. Setiap proses pelayanan administrasi tercatat dalam sistem, mulai dari pengajuan permohonan hingga penyelesaian surat. Pencatatan digital tersebut memudahkan aparatur desa dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya serta mengurangi potensi praktik pelayanan yang tidak sesuai dengan standar operasional. Kondisi ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan keterbukaan dan pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan ([Gamaputra et al., 2022](#); [Habibah et al., 2024](#)).

Di samping meningkatkan transparansi, penerapan aplikasi sipraja juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan desa. Kualitas administrasi dapat dilihat dari ketepatan data, kerapian arsip, serta kesesuaian pelayanan dengan prosedur yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan sistem digital membantu aparatur desa dalam mengelola dokumen administrasi secara lebih tertib dan terstruktur, sehingga mengurangi kesalahan pencatatan yang sering terjadi pada sistem manual ([Agustina et al., 2022](#); [Febriani & Prathama, 2022](#)).

Kualitas administrasi yang meningkat juga tercermin dari konsistensi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Melalui aplikasi sipraja, format surat dan alur pelayanan telah disandarkan dalam sistem, sehingga pelayanan menjadi lebih seragam dan profesional. Standarisasi ini membantu aparatur desa dalam bekerja secara lebih sistematis dan meminimalkan perbedaan pelayanan antar petugas. Hal ini berdampak positif terhadap citra pemerintah desa sebagai penyelenggaraan pelayanan publik yang modern dan responsif ([Apreliyanto & Agustina, 2024](#)).

Peningkatan transparansi dan kualitas administrasi melalui sipraja masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan literasi digital sebagian masyarakat dan aparatur desa. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat penerapan sipraja jauh lebih besar dibandingkan kendala yang ada. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan berupa pelatihan, sosialisasi, serta pengembangan sistem agar transparansi dan kualitas administrasi desa dapat terus ditingkatkan. Secara keseluruhan, penerapan aplikasi sipraja terbukti mampu meningkatkan transparansi dan kualitas administrasi dilingkungan pemerintah desa. Pelayanan yang terbuka, tertib, dan terdokumentasi dengan baik tidak hanya meningkatkan kinerja aparatur desa, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi pelayanan berbasis digital merupakan langkah yang tepat dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat ([Agustina et al., 2022](#); [Apreliyanto & Agustina, 2024](#)).

3. Kesiapan dan kendala sumber daya

Kesiapan sumber daya merupakan faktor penting dalam keberhasilan penerapan aplikasi sipraja sebagai sistem pelayanan administrasi berbasis digital di pemerintahan desa. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan sistem dan kebijakan. Berdasarkan hasil pkl, aparatur desa pada umumnya telah memiliki kesiapan dasar dalam menjalankan pelayanan berbasis aplikasi, khususnya dalam mengoperasikan sipraja untuk pelayanan surat menyurat. Kesiapan ini menjadi modal awal dalam mendukung transformasi pelayanan publik menuju sistem yang lebih modern dan efisien ([Dianingtyas & Roekminiati, 2024](#)).

Dari aspek sumber daya manusia, kesiapan aparatur desa terlihat dari kemampuan mereka dalam memahami alur pelayanan digital dan mengoperasikan aplikasi sipraja sesuai tugas masing-masing. Selama pelaksanaan penelitian aparatur desa Berperan aktif dalam memproses permohonan surat melalui sistem, melakukan verifikasi data, serta mencetak dokumen administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur desa telah mampu beradaptasi dengan perubahan sistem pelayanan dari manual ke digital ([Syahronny et al., 2024](#)).

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya kendala pada aspek sumber daya manusia, khususnya terkait keterbatasan literasi digital. Tidak semua aparatur desa memiliki tingkat pemahaman teknologi yang sama, sehingga masih diperlukan pendampingan dan pelatihan secara berkelanjutan. Selain itu, sebagian masyarakat desa, terutama kelompok lanjut usia, masih mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi sipraja secara mandiri, sehingga tetap membutuhkan bantuan langsung dari aparatur desa ([Hanifah & Choiriyah, 2024](#)).

Kendala lainnya ditemukan pada aspek sarana dan prasarana pendukung pelayanan digital. Ketersediaan perangkat komputer, jaringan internet, serta kestabilan sistem menjadi faktor penentu kelancaran pelayanan melalui Sipraja. Berdasarkan pengamatan selama penelitian, gangguan jaringan internet dan kendala teknis aplikasi terkadang menghambat proses pelayanan administrasi, sehingga pelayanan tidak dapat dilakukan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan infrastruktur masih perlu ditingkatkan ([Tamrin et al., 2022](#)).

Kesiapan sumber daya juga dipengaruhi oleh dukungan kebijakan dan manajemen pelayanan. Keberhasilan penerapan sipraja membutuhkan komitmen dari pemerintah desa dalam bentuk regulasi internet, pembagian tugas yang jelas, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan digital. Dari hasil penelitian, dukungan pimpinan desa menjadi faktor penting dalam mendorong aparatur untuk menjalankan pelayanan berbasis aplikasi secara konsisten ([Ningtias & Mursyidah, 2024](#); [Suryaningrum & Mursyidah, 2023](#)).

4. Kesimpulan

Penerapan aplikasi sipraja memberikan dampak positif, khususnya dalam pelayanan surat menyurat. Pemanfaatan teknologi informasi melalui sipraja mampu mengubah sistem pelayanan manual menjadi pelayanan berbasis digital yang lebih cepat, efektif, dan efisien. Penerapan aplikasi sipraja terbukti meningkatkan efektivitas dan efesiensial pelayanan administrasi desa. Proses pelayanan menjadi lebih sederhana waktu penyelesaian lebih singkat, serta beban kerja aparatur desa dapat dikurangi. Masyarakat juga memperoleh kemudahan dalam mengajukan permohonan surat tanpa harus datang langsung ke kantor desa, sehingga menghemat waktu dan biaya. Penggunaan sipraja turut meningkatkan transparansi dan kualitas administrasi pemerintahan desa. Setiap tahapan pelayanan tercatat secara sistematis dalam aplikasi, sehingga memudahkan pemantauan, meningkatkan akuntabilitas aparatur desa, serta mengurangi risiko kesalahan administrasi dan kehilangan arsip. Hal ini berdampak pada meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa. Penerapan aplikasi sipraja merupakan langkah yang tepat dalam mendukung transformasi pelayanan publik di tingkat desa. Dengan adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur, serta pengembangan sistem secara berkelanjutan, aplikasi sipraja diharapkan dapat memberikan pelayanan administrasi desa yang semakin optimal, transparansi, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z. (2024). Enhancing Public Service Delivery through Digital Transformation: Challenges and Opportunities in the Era of E-Government. *Pakistan Journal of Life and Social Sciences (PJLSS)*, 22(2). <https://doi.org/10.57239/pjlss-2024-22.2.001601>
- Agustina, D. E., Hikmah, M., & Putri, F. E. (2022). Peningkatan Efektifitas Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Sipraja Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 5(2). <https://doi.org/10.47647/jsh.v5i2.912>
- Apreliyanto, E., & Agustina, I. F. (2024). SIPRAJA Application-Based Village Governance Tata Kelola Pemerintahan Desa Berbasis Aplikasi SIPRAJA. *Web of Scientist International Scientific Research Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.47134/webofscientist.v2i1.29>
- Aprilia, V. A., & Sukmana, H. (2023). Implementasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) di Desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1). <https://doi.org/10.33506/jn.v9i1.2640>
- Dianingtyas, A., & Roekminiati, S. (2024). Evaluasi Pelayanan SIPRAJA dalam Pengurusan Data Penduduk di Kecamatan Taman Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 8(1). <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v8i1.7650>
- Doverianda, B., Wardiyanto, B., & Setijaningrum, E. (2025). Membangun Layanan Publik yang Partisipatif: Studi Kasus SIPRAJA melalui Perspektif New Public Governance. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(3). <https://doi.org/10.38035/rj.v7i3.1367>
- Febriani, E. R., & Prathama, A. (2022). Strategi Peningkatan Pelayanan Melalui Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo 4.0 (SiPraja 4.0). *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(4). <https://doi.org/10.31258/jkp.v13i4.8119>
- Gamaputra, G., Rosalia, N. A., Khoirunisa, K., & Kusyeni, Rd. (2022). Penerapan Standar Pelayanan Publik Melalui Aplikasi SIPRAJA (Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo) Di Kantor Kelurahan Celep. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 5(2). <https://doi.org/10.31334/transparansi.v5i2.2662>
- Habibah, B. P. N., Wijayanti, S. S., Saputra, T. A., & Amalia, D. (2024). Persepsi Masyarakat Terhadap Edukasi Mengenai Aplikasi Sipraja dari Pemkab Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(13).

- Hanifah, R., & Choiriyah, I. U. (2024). Implementasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) di Desa Tambaksumur, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. *Web of Scientist International Scientific Research Journal*, 1(3). <https://doi.org/10.47134/webofscientist.v1i3.38>
- Jamaluddin, J., Nur, S. A., & Darwis, M. (2023). Effectiveness of Office Administration Governance in Improving the Quality of Administrative Services. *Pinisi Journal of Education and Management*, 2(2). <https://doi.org/10.26858/pjoem.v2i2.53525>
- Kassen, M. (2024). Blockchain and public service delivery: a lifetime cross-referenced model for e-government. *Enterprise Information Systems*, 18(4). <https://doi.org/10.1080/17517575.2024.2317175>
- Laisa, L., Abdussamad, J., & Tahopi, R. (2025). Quality of Village Administration Services Based on Electronic Government in Sipatana District, Gorontalo City. *International Journal Papier Public Review*, 6(1). <https://doi.org/10.47667/ijppr.v6i1.345>
- Maylita, B. R. (2025). Evaluasi Sipraja dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*.
- Mphahlele, N. S., Kekwaletswe, R. M., & Seaba, T. R. (2025). Model to explain use of E-Government service change: Use of unified theory of acceptance and use of technology and information systems success model to explain use of E-Government service change: Emerging market case. *Telematics and Informatics Reports*, 17. <https://doi.org/10.1016/j.teler.2025.100190>
- Mulyaningsih, A. S., & Rahmaningtyas, W. (2025). Analysis of Village Government Service Quality in Efforts to Improve Community Satisfaction. *Economic Education Analysis Journal*, 14(3). <https://doi.org/10.15294/eeaj.v14i3.28679>
- Musaddad, A. A., Susilowati, M., Ahzani, W. K. F., & Arif, L. (2020). 330010-Implementasi-Sistem-Pelayanan-Rakyat-Sid-2304Fd4a. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(6).
- Ningtias, M. N. T., & Mursyidah, L. (2024). Implementation of Sidoarjo People's Service System (SiPraja). *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 25(1). <https://doi.org/10.21070/ijppr.v25i1.1365>
- Oribel, F., & Wibawani, S. (2023). Efektivitas Sipraja Di Desa Sugihwaras Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(2). <https://doi.org/10.33506/jn.v8i2.2422>
- Saffana, A. N., & Rodiyah, I. (2025). Implementasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo di Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(1). <https://doi.org/10.33506/jn.v11i1.3891>
- Saputra, D. P., & Widiyarta, A. (2021). Efektivitas Program SIPRAJA Sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 7(2). <https://doi.org/10.30996/jpap.v7i2.4497>
- Setyawan, A. C. (2024). Enhancing Public Service Delivery through Digital Transformation: A Study on the Role of E-Government in Modern Public Administration. *Global International Journal of Innovative Research*, 2(10). <https://doi.org/10.59613/global.v2i10.340>
- Suryaningrum, A., & Mursyidah, L. (2023). Evaluasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) Sebagai Inovasi Pelayanan Publik [The Evaluation of the Service System of Sidoarjo Community (SIPRAJA) As a Public Service]. *UMSIDA Preprints Server*.
- Syahronny, M., Rochim, A. I., & Murti, I. (2024). Analisis Penerapan E-Government Pada Aplikasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (Sipraja) Di Desa Prambon Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469)*, 4(06). <https://doi.org/10.69957/paob.v4i06.1675>
- Tamrin, M. H., Umiyati, S., Arieffiani, D., Lubis, L., Ambarwati, A., & Achmad, Z. A. (2022). Optimalisasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) Menuju Kalanganyar sebagai Desa Digital. *JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian Dan Penerapan IPTEK)*, 6(2). <https://doi.org/10.31284/j.jpp-iptek.2022.v6i2.3612>
- Wijayanti, E. I., Asri, S., & Suroyo, S. (2022). Effects of Quality of Administrative Services and Quality of Health Services on Patient Satisfaction in Tanjung Redeb Health Center, Berau Regency. *International Journal of Community Service & Engagement*, 3(4). <https://doi.org/10.47747/ijcse.v3i4.911>